

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap organisasi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas yang menjadi kegiatannya wajib memiliki rencana-rencana yang disusun dan dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah daerah. Sejalan dengan tugas yang akan dilaksanakan pemerintah daerah wajib merumuskan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk anggaran yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatannya. Anggaran merupakan salah satu wujud akuntabilitas pemerintah daerah pada masyarakat (Septiadi, 2011).

Sebagai salah satu wujud akuntabilitas pemerintah daerah diperlukan kewajiban tanggungjawab dalam perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang dijadikan pedoman dalam menentukan standar kinerja pemerintah daerah. Menurut Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa akuntabilitas atau pertanggungjawaban Pemerintah Daerah terdiri dari pertanggungjawaban ke pemerintah pusat dan pertanggungjawaban ke masyarakat melalui DPRD. Hal ini sesuai dengan akuntabilitas Pemerintah Daerah sehubungan dengan tugas Pemerintah Daerah melayani masyarakat dengan DPRD sebagai pengawas kinerja

Pemerintah Daerah melalui anggaran. Anggaran merupakan tolak ukur kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya. Kinerja akan dinilai baik ketika anggaran tersebut tercapai.

Proses penganggaran dengan pendekatan kinerja dalam kependagri memuat pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dilaksanakan oleh Tim Anggaran Eksekutif bersama-sama Unit Organisasi Perangkat Daerah (unit kerja) (Fadli, 2011). Rancangan anggaran unit kerja dimuat dalam suatu dokumen yang disebut dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA), satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana kegiatan anggaran (RKA) dengan proses bottom-up yang merupakan proses penyusunan anggaran berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan anggaran ditentukan belakangan setelah tujuan selesai disusun. Proses penyusunan anggaran dari bawah ke atas merupakan komunikasi strategis antara tujuan dengan anggaran. Agar dapat mempersiapkan dan mengevaluasi berbagai alternatif tujuan anggaran, dimana anggaran senantiasa digunakan sebagai tolak ukur kinerja setiap unit kerja aparat Pemerintah Daerah (Giusti, 2013).

Setiap aparatur pemerintah daerah diberi peran untuk melaksanakan kegiatan pencapaian sasaran yang ditetapkan oleh anggaran. Masalah yang sering muncul dari adanya keterlibatan manajer tingkat bawah/menengah dalam penyusunan anggaran adalah penciptaan senjangan anggaran (Giusti,

2013). Senjangan anggaran biasanya dilakukan dengan meninggikan biaya atau menurunkan pendapatan dari yang seharusnya, supaya anggaran mudah dicapai (Merchant, 1981 dalam Giusti, 2013). Adapun menurut (Hilton dalam Falikhatun, 2007), tiga alasan utama manajer melakukan senjangan anggaran:

1. Orang-orang selalu percaya bahwa hasil pekerjaan mereka akan terlihat bagus di mata atasan jika mereka dapat mencapai anggarannya.
2. Senjangan anggaran selalu digunakan untuk mengatasi kondisi ketidakpastian, jika tidak ada kejadian yang tidak terduga, yang terjadi manajer bawah tersebut dapat mencapai anggarannya.
3. Rencana anggaran selalu dipotong dalam proses pengalokasian sumber daya.

Senjangan anggaran diciptakan untuk menyembunyikan beberapa informasi pribadi dari atasan mereka dan sengaja menggambarkan informasi yang hanya dapat menguntungkan diri mereka sendiri melalui pengenalan slack (Damrongsukniwat, 2011 dalam Suartana, 2013).

Senjangan anggaran dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor tersebut adalah partisipasi anggaran bawahan yaitu manajemen bawah yang terlibat penyusunan anggaran. Penelitian yang menguji hubungan partisipasi dengan senjangan anggaran telah banyak dilakukan untuk meneliti perilaku bawahan dalam menentukan standar anggaran.

Partisipasi anggaran merupakan keikutsertaan bawahan dalam menyusun anggaran. Penelitian yang dilakukan oleh Falikhatun (2007), Kartika (2010), Septiadi (2011), Fadli (2011), Suartana (2013), Giusti (2013),

menunjukkan hasil bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran. Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi yang tinggi dalam penyusunan anggaran akan meningkatkan senjangan anggaran.

Hasil penelitian tersebut tidak konsisten dengan hasil penelitian Sugiwardani (2012) dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh negatif terhadap senjangan anggaran yang berarti bahwa partisipasi anggaran menurunkan senjangan anggaran.

Dari hasil penelitian terdahulu, masih terdapat perbedaan-perbedaan hasil, partisipasi meningkatkan senjangan dan partisipasi menurunkan anggaran, hal ini dikarenakan perbedaan obyek yang diteliti dan variabel moderating yang digunakan dalam meneliti hubungan partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran. Faktor-faktor kontijensi sebagai prediktor yang mempengaruhi hubungan antara partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran (Govindarajan, 1986 dalam Latuheru, 2006 dalam Suartana, 2014), diantaranya adalah faktor Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi, Informasi Asimetri dan Ketidakpastian Lingkungan.

Budaya organisasi merupakan sebuah kesepakatan yang berupa norma maupun aturan yang akan dilaksanakan oleh komponen organisasi yang berindikasi dapat mempengaruhi individu dalam bekerja atau menyusun anggaran. Komitmen organisasi juga diduga dapat mempengaruhi partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran karena komitmen organisasi merupakan dorongan individu untuk berbuat sesuatu untuk kepentingan organisasi dibandingkan dengan kepentingan pribadinya sendiri, individu yang

mempunyai komitmen organisasi yang tinggi cenderung tidak akan melakukan kesenjangan anggaran.

Informasi asimetri diduga merupakan salah satu faktor adanya senjangan anggaran, karena bagi tujuan perencanaan, anggaran yang dilaporkan seharusnya sama dengan kinerja yang diharapkan (Falikhatun, 2007). Namun karena bawahan lebih menguasai informasi ditempat dia bekerja akan mengambil kesempatan dari partisipasi anggaran, kondisi tersebut terjadi pada kondisi ketidakpastian lingkungan yang rendah. Ketidakpastian lingkungan didefinisikan sebagai rasa ketidakmampuan individu untuk memprediksi suatu yang terjadi dilingkungan secara akurat. Mengacu pada pendapat Govindarajan (1986) dalam Kartika (2010) dapat disimpulkan bahwa hubungan antara partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran positif dalam kondisi ketidakpastian lingkungan yang rendah dan sebaliknya.

Dalam penelitian Kartika, (2010) dengan menggunakan dua variabel moderating yaitu variabel komitmen organisasi dan ketidakpastian lingkungan yang dilakukan di Rumah Sakit Swasta di Kota Semarang, oleh karena itu dalam penelitian saya dilakukan di Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Bantul dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Sleman dengan menambah variabel moderating Budaya organisasi dan Informasi Asimetri yang diduga mempengaruhi hubungan partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran. Maka judul yang diajukan dalam penelitian ini adalah **“Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap**

Senjangan Anggaran dengan Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi, Informasi Asimetri dan Ketidakpastian Lingkungan Sebagai Variabel Pemoderasi”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran?
2. Apakah budaya organisasi, komitmen organisasi, ketidakpastian lingkungan berpengaruh negatif terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran?
3. Apakah informasi asimetri berpengaruh positif terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menemukan bukti empiris adanya pengaruh partisipasi anggaran terhadap senjangan anggaran dengan budaya organisasi, komitmen organisasi, informasi asimetri dan ketidakpastian lingkungan sebagai variabel pemoderasi.

D. Manfaat Penelitian

Setelah dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, diantaranya :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi PEMDA dalam rangka penerapan anggaran berbasis kinerja.

2. Dapat menjadi masukan bagi peneliti lain yang berminat dan tertarik memperdalam penelitian akuntansi, terutama dalam akuntansi pemerintahan.
3. Bagi akademisi Sebagai pengembangan literatur akuntansi khususnya disektor pemerintahan dan diharapkan dapat menambah refrensi untuk selanjutnya.